



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012, perlu menjabarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 7); 91

26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 30); Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 98.100.075.156,43
b. Dana Perimbangan	Rp. 488.535.243.324,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 105.807.251.407,86

Jumlah Pendapatan

Rp. 692.442.569.888,29

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 251.962.308.498,00
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. - 41

4) Belanja Hibah	Rp.	2.288.065.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.207.497.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.816.561.305,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	29.497.457.861,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	282.987.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp.289.054.876.664,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	31.200.748.301,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	127.063.768.591,00
3) Belanja Modal	Rp.	228.945.561.702,00

Jumlah Belanja Langsung

Rp 387.210.078.594,00

Jumlah Belanja

Rp 676.264.955.258,00

Surplus/(Defisit)

Rp. 16.177.614.630,29

3. Pembiayaan

a) Penerimaan	Rp.	103.229.013.106,70
b) Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>14.046.739.372,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 89.182.273.734,70

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan

Rp. 105.359.888.364,99 

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Luwu Timur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6

Peraturan Bupati Luwu Timur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *q*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN I	<i>h</i>
KADIS PPKAD	<i>h</i>
KABID Akuntansi	<i>h</i>
KASUBAG / KASI Pelaporan	<i>h</i>

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI LUWU TIMUR,

h
ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

h

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 14

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2012

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	100,425,012,948.00	98,100,075,156.43	2,324,937,791.57
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	68,324,519,913.00	69,822,893,882.93	(1,146,851,427.00)
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	12,154,833,600.00	14,659,294,324.00	1,088,372,881.89
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5,300,000,000.00	5,247,215,444.80	(26,534,896.00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,645,659,435.00	8,370,671,504.70	2,979,718,774.27
4.2	Dana Perimbangan	483,052,837,252.00	488,535,243,324.00	(5,482,406,072.00)
4.2.01	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	72,498,828,252.00	77,981,234,324.00	17,096,943,998.00
4.2.02	Dana Alokasi Umum	365,829,499,000.00	365,829,499,000.00	0.00
4.2.03	Dana Alokasi Khusus	44,724,510,000.00	44,724,510,000.00	0.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	137,725,278,522.00	105,807,251,407.86	31,918,027,114.14
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	73,109,000.00	(73,109,000.00)
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	88,000,000,000.00	56,738,564,437.86	31,261,435,562.14
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37,696,281,876.00	36,681,273,000.00	1,015,008,876.00
4.3.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12,028,996,646.00	12,314,304,970.00	(285,308,324.00)
	Jumlah Pendapatan	721,203,128,722.00	692,442,569,888.29	28,760,558,833.71
5	Belanja			
5.1	Belanja Tidak Langsung	306,644,874,473.00	289,054,876,664.00	17,589,997,809.00
5.1.01	Belanja Pegawai	267,642,693,649.00	251,962,308,498.00	(12,460,278,796.00)
5.1.03	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
5.1.04	Belanja Hibah	1,881,000,000.00	2,288,065,000.00	(569,190,000.00)
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	1,230,842,000.00	1,207,497,000.00	(2,008,050,000.00)
5.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3,852,673,126.00	3,816,561,305.00	(30,243,365.00)
5.1.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30,537,665,698.00	29,497,457,861.00	(286,485,738.00)
5.1.08	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	282,987,000.00	(500,000,000.00)
5.2	Belanja Langsung	454,442,757,076.00	387,210,078,594.00	67,232,678,482.00
5.2.01	Belanja Pegawai	34,998,254,500.00	31,200,748,301.00	(3,878,934,508.00)
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	152,711,975,025.00	127,063,768,591.00	(22,356,446,004.00)
5.2.03	Belanja Modal	266,732,527,551.00	228,945,561,702.00	(47,881,953,074.96)
	Jumlah Belanja	761,087,631,549.00	676,264,955,258.00	84,822,676,291.00
	Surplus / (Defisit)	(39,884,502,827.00)	16,177,614,630.29	(56,062,117,457.29)
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	103,131,541,468.00	103,229,013,106.70	(97,471,638.70)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	103,131,541,468.00	103,131,541,468.70	(0.70)
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	97,471,638.00	(97,471,638.00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	103,131,541,468.00	103,229,013,106.70	(97,471,638.70)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16,788,965,751.00	14,046,739,372.00	2,742,226,379.00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	16,788,965,751.00	13,046,739,372.00	2,742,226,379.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16,788,965,751.00	14,046,739,372.00	2,742,226,379.00
	Pembiayaan Neto	86,342,575,717.00	89,182,273,734.70	(2,839,698,017.70)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	46,458,072,890.00	105,359,888,364.99	151,817,961,254.99

SFKDA
ASISTEN I
KASIS PPKAD
KABID AKuntansi
BAG / KASI Pelaporan

BUPATI LUWU TIMUR

HANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 14 Tahun 2013
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2012	2011
I. ASET		4.5.1.1.1		
1. ASET LANCAR		4.5.1.1.1.1)		
	Kas	4.5.1.1.1.1).(1)		
	Kas di Kas Daerah	4.5.1.1.1.1).(1).(1))	102,903,375,022.99	106,185,516,027.70
	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.5.1.1.1.1).(1).(2))	5,959,184,850.00	205,461,119.00
	Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.1.1.1.1).(1).(3))		37,723,563.00
	Piutang	4.5.1.1.1.1).(2)		
	Piutang Pajak	4.5.1.1.1.1).(2).1	5,452,579,456.00	0.00
	Piutang Retribusi	4.5.1.1.1.1).(2).2	0.00	17,273,733.00
	Piutang Dana Bagi Hasil	4.5.1.1.1.1).(2).3	46,395,763,959.31	3,295,823.00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.5.1.1.1.1).(2).4	14,860,000.00	105,329,230.00
	Piutang Lain - lain	4.5.1.1.1.1).(2).5	0.00	97,471,638.00
	Persediaan	4.5.1.1.1.1).(3)	13,159,054,244.00	11,791,100,831.00
	Jumlah Aset Lancar		173,884,817,532.30	118,443,171,964.70
2. INVESTASI JANGKA PANJANG		4.5.1.1.1.2)		
	Investasi Nonpermanen	4.5.1.1.1.2).(1)		
	Investasi Dana Bergulir		1,705,820,735.00	1,528,047,947.00
	Investasi Nonpermanen Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Investasi Nonpermanen		1,705,820,735.00	1,528,047,947.00
	Investasi Permanen	4.5.1.1.1.2).(2)		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		26,869,438,966.22	26,387,944,331.41
	Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Investasi Permanen		26,869,438,966.22	26,387,944,331.41
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		28,575,259,701.22	27,915,992,278.41
3. ASET TETAP		4.5.1.1.1.1).(3)		
	Tanah	4.5.1.1.1.1).(3).1	119,212,022,380.00	117,371,284,180.00
	Peralatan dan Mesin	4.5.1.1.1.1).(3).2	239,000,167,361.44	203,784,500,423.44
	Bangunan dan Gedung	4.5.1.1.1.1).(3).3	483,413,514,546.00	451,779,588,430.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.5.1.1.1.1).(3).4	797,002,521,856.42	730,757,082,773.42
	Aset Tetap Lainnya	4.5.1.1.1.1).(3).5	9,630,733,517.00	9,874,096,517.00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.5.1.1.1.1).(3).6	227,497,543,037.00	119,460,988,357.00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0.00	0.00
	Jumlah Aset Tetap		1,875,756,502,697.86	1,633,027,540,680.86
4. DANA CADANGAN		4.5.1.1.1.4)		
	Dana Cadangan		0.00	0.00
	Jumlah Dana Cadangan		0.00	0.00
5. ASET LAINNYA		4.5.1.1.1.5)		
	Aset dalam Penguasaan Pihak Ketiga		0.00	0.00
	Aset tak Berwujud		1,881,612,000.00	1,765,977,000.00
	Aset Lain - lain		1,251,713,032.00	199,543,527.00
	Jumlah Aset Lainnya		3,133,325,032.00	1,965,520,527.00
	JUMLAH ASET		2,081,349,904,963.38	1,781,352,225,450.97

NO.	URAIAN	REF	2012	2011
II.	KEWAJIBAN	4.5.1.1.2		
1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.5.1.1.2.1)		
	Utang kepada Pihak Ketiga	4.5.1.1.2.1).(1)	15,890,947,002.00	14,227,712,969.00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.1.1.2.1).(1)	3,495,991,329.00	3,259,435,678.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.5.1.1.2.1).(1)	6,845,619,335.00	1,918,431,658.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26,232,557,666.00	19,405,580,305.00
2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.5.1.1.2.2)		
	Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
	Utang Luar Negeri		0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		26,232,557,666.00	19,405,580,305.00
III.	EKUITAS DANA	4.5.1.1.3		
1.	Ekuitas Dana Lancar	4.5.1.1.3.1)		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	4.5.1.1.3.1).1	105,359,888,364.99	103,131,541,468.70
	Pendapatan yang Ditangguhkan	4.5.1.1.3.1).2	41,147,779.00	37,723,563.00
	Cadangan Piutang	4.5.1.1.3.1).3	51,863,203,415.31	223,370,424.00
	Cadangan Persediaan	4.5.1.1.3.1).4	13,159,054,244.00	11,791,100,831.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	4.5.1.1.3.1).5	(22,736,566,337.00)	(16,146,144,627.00)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		147,686,727,466.30	99,037,591,659.70
2.	Ekuitas Dana Investasi	4.5.1.1.3.2)		
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	4.5.1.1.3.b.1	28,575,259,701.22	27,915,992,278.41
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.5.1.1.3.b.2	1,875,756,502,697.86	1,633,027,540,680.86
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	4.5.1.1.3.b.3	3,133,325,032.00	1,965,520,527.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0.00	0.00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1,907,465,087,431.08	1,662,909,053,486.27
3.	Ekuitas Dana Cadangan	4.5.1.1.3.3)		
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0.00	0.00
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA		2,055,151,814,897.38	1,761,946,645,145.97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2,081,384,372,563.38	1,781,352,225,450.97

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

RESEPT PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
ASISTEN I		
KADIS	PPKAD	
KABID	Akuntansi	
KASUBAG / KASI Pelaporan		

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2012

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2012	2011
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	4.5.1.III.1		
1.	Arus Masuk Kas	4.5.1.III.1.1)		
	Pajak Daerah		69,822,893,882.93	40,554,348,573.00
	Retribusi Daerah		14,659,294,324.00	10,021,616,881.89
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5,247,215,444.80	3,223,465,104.00
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		8,370,671,504.70	10,272,718,774.27
	Dana Bagi Hasil Pajak		59,637,630,399.00	55,697,000,430.00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		18,343,603,925.00	35,246,237,187.00
	Dana Alokasi Umum		365,829,499,000.00	293,479,338,000.00
	Dana Alokasi Khusus		44,724,510,000.00	41,585,100,000.00
	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00
	Dana Penyesuaian		36,681,273,000.00	68,083,688,880.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		56,738,564,437.86	83,899,194,331.52
	Pendapatan Bantuan Keuangan		12,314,304,970.00	10,415,085,094.00
	Pendapatan Hibah		73,109,000.00	1,150,000,000.00
	Dana Darurat		0.00	0.00
	Pendapatan Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas		692,442,569,888.29	653,627,793,255.68
2.	Arus Keluar Kas	4.5.1.III.1.2)		
	Belanja Pegawai		284,756,709,549.00	255,543,364,864.00
	Belanja Barang dan Jasa		125,470,115,841.00	122,247,082,656.00
	Belanja Bunga		0.00	0.00
	Belanja Subsidi		0.00	0.00
	Belanja Hibah		2,288,065,000.00	4,342,475,000.00
	Belanja Bantuan Sosial		1,207,497,000.00	3,366,183,778.00
	Belanja Bagi Hasil ke Desa		33,314,019,166.00	26,522,005,795.00
	Belanja Bantuan Keuangan		0.00	0.00
	Belanja Tidak Terduga		282,987,000.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas		447,319,393,556.00	412,021,112,093.00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		245,123,176,332.29	241,606,681,162.68
II.	ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	4.5.1.III.2		
	Arus Masuk Kas	4.5.1.III.2.1)		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0.00	35,000,000.00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0.00	35,000,000.00
2.	Arus Keluar Kas	4.5.1.III.2.2)		
	Belanja Tanah		1,840,738,200.00	871,105,600.00
	Belanja Peralatan dan Mesin		34,599,690,184.00	32,990,970,857.00
	Belanja Bangunan dan Gedung		57,068,665,185.00	37,058,494,354.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		134,063,028,183.00	93,035,141,697.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		1,373,439,950.00	3,578,930,071.00
	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas		228,945,561,702.00	167,534,642,579.00
	Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Aset Nonkeuangan		(228,945,561,702.00)	(167,499,642,579.00)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	4.5.1.III.3		
1.	Arus Masuk Kas	4.5.1.III.3.1)		
	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00
	Penerimaan Sisa Kas Tahun Anggaran Sebelumnya		205,461,119.00	62,394,000.00
	Penerimaan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0.00	0.00
	Penerimaan Piutang Daerah		97,471,638.00	121,695,595.00
	Jumlah Arus Masuk Kas		302,932,757.00	184,089,595.00
2.	Arus Keluar Kas	4.5.1.III.3.2)		
	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		1,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Pengeluaran Pembiayaan-Invenstasi Non Permanen		0.00	1,053,920,500.00

NO.	URAIAN	REF	2012	2011
	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0.00	0.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00
	Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0.00	0.00
	Pembayaran Uang Persediaan (CP)		0.00	0.00
	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga		13,046,739,372.00	0.00
	Pengeluaran Sisa Kas/UUDP Tahun Berkenaan		5,852,072,016.00	205,461,119.00
	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir		0.00	0.00
	Pemberian Pinjaman Daerah - Lain-lain		0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas		19,898,811,388.00	11,259,381,619.00
	Arus Kas Bersih (untuk) dan dari Aktivitas Pembiayaan		(19,595,878,631.00)	(11,075,292,024.00)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	4.5.1.III.4		
1.	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		35,770,802,297.00	25,657,585,503.00
2.	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		35,634,679,301.00	24,462,359,876.00
	Arus Kas Bersih dari dan (untuk) Aktivitas Nonanggaran		136,122,996.00	1,195,225,627.00
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(3,282,141,004.71)	64,226,972,186.68
	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		106,185,516,027.70	41,958,543,841.02
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		102,903,375,022.99	106,185,516,027.70
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		5,959,184,850.00	205,461,119.00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		34,467,600.00	37,723,563.00
	Saldo Akhir Kas		108,897,027,472.99	106,428,700,709.70

BUPATI LUWU TIMUR

H.ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KAOIS PPKAD	
KABID Akuntansi	
KASUBAG / KASI Pelaporan	